

**STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN CALON H. MUHAMMAD
JA'FAR SUKHAIRI NASUTION DAN ATIKA AZMI UTAMMI
NASUTION DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020**



SKRIPSI

Oleh :

AHMAD RUSDI

188510080

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU

SOSIAL DAN ILLMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)14/4/23

**STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN CALON H. MUHAMMAD JA'FAR
SUKHAIRI NASUTION DAN ATIKA AZMI UTAMMI NASUTION DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN
2020**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Di Fakultas

Isipol

Universitas Medan Area

OLEH

AHMAD RUSDI

188510080

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad
Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utarni
Nasution Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di
Kabupaten Mandailing Natal 2020

Nama Mahasiswa : Ahmad Rusdi

NPM : 188510080

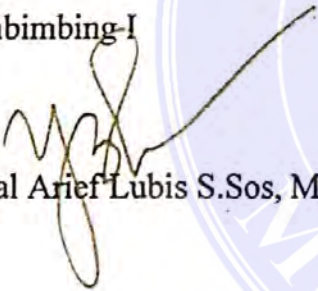
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

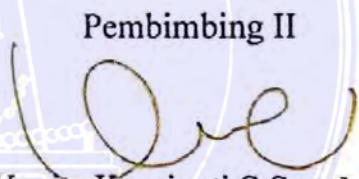
Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing-I

Pembimbing II



Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP



Evi Yunita Kurniyati S.Sos, M.AP

Mengetahui :

Ka.Prodi Ilmu Pemerintahan



Dekan

Dr. Effiati Juliana Harahap. M.Si


Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/4/23

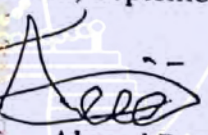
LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2022




Ahmad Rusdi

188510080

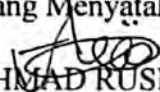
**HALAMAN PERSETUJUAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rusdi
NPM : 188510080
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : ISIPOL
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusife Royalti-free Right*). Atas karya saya yang berjudul “ **Strategi Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020**” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, Mengalih media/informatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selalu tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya :

Dibuat : Medan
Pada Tanggal : 19 September 2022
Yang Menyatakan :

AHMAD RUSDI

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Rusdi dilahirkan di Pagur Kecamatan Pnyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Pada tanggal 21 Juli 2000. Penulis merupakan anak ke enam dari enam bersaudara pasangan dari Bapak Junit dan Ibuk Asminah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD 142585 Pagur pada Tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Panyabungan berakhir pada Tahun 2015. Dan selesai dari situ penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Panyabungan. Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ke Universitas Medan Area pada Tahun 2018. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan YME yang memberikan rahmat dan karunianya. Dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua sayang yang mendukung saya untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, penulis mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan.

ABSTRAK

STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN CALON H. MUHAMMAD

JA'FAR SUKHAIRI NASUTION DAN ATIKA AZMI UTAMMI

NASUTION DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI

KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020

Sejak tahun 2005 pemilihan kepada daerah di Indonesia dilakukan secara langsung. Dan pada tahun 2020 untuk pertama kali diadakan Pilkada serentak. Kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu daerah yang ikut melangsungkan Pilkada serentak. Pada Pilkada serentak 2020 Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari tiga pasangan calon yang ikut dalam kontestasi politik. Ketiga pasangan calon bersaing ketat untuk memenangkan kontestasi. Dan persaingan itu ditandai dengan adanya pemilihan suara ulang. Untuk memenangkan kontestasi politik, strategi dan taktik menjadi hal yang sangat penting. Karena tanpa strategi dan taktik mustahil pasangan calon bisa memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Strategi Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution dan Atika Utammi Azmi Nasution Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dan data di analisis secara Kualitatif. Adapun hasil dari penelitian adalah pasangan calon Jakfar dan Atika melakukan Strategi seperti, pendekatan kepada tokoh-tokoh Masyarakat, Pemuda, dan akademisi. Mengoptimalkan kerjasama tim pemenangan dan tim partai Politik sebagai mesin Politik. Melakukan kampanye yang sesuai dengan kebudayaan atau kearifan lokal Masyarakat. Dan melakukan pendekatan kepada anak-anak muda atau kaum Milenial. Adapun hambatan yang dialami pasangan Jakfar dan Atika seperti kesamaan marga (Nasution), kurangnya komitmen dari Partai-partai Politik pendukung untuk menggerakkan mesin Politik partai. Salah satu calon merupakan Wakil Bupati pada periode sebelumnya sehingga membuat Masyarakat merasa pesimis untuk perubahan. Dan calon Wakil Bupati di pandang belum memiliki pengalaman di bidang Politik dan Pemerintahan serta masih dalam usia yang cukup muda untuk memimpin Kabupaten sebesar Mandailing Natal.

Kata Kunci : strategi, kampanye, politik

ABSTRACT

WINNING STRATEGY OF CANDIDATES PARTNER H. MUHAMMAD JA'FAR SUKHAIRI NASUTION AND ATIKA AZMI UTAMMI NASUTION ON DISTRICT HEAD ELECTION IN MANDAILING NATAL REGENCY IN 2020

Since 2005 election of district in Indonesia was held directly. And in 2020 for the first time the election held concurrently. And mandailing natal regency, north Sumatra province being 1 of xone which held concurrently election . at concurrently election of 2020 mandailing natal regency it contains by 3 candidates whom participate in politic contestation. All of 3 candidates is tightly compete to winning a contestation . and that competition marked by as re-count the election votes to winning politic contestation , strategy being important thing . due of without it the candidates hard to winning the competition . therefore , writer had interest to making research with tittle winning strategy of candidates partner h. muhammad ja'far sukhairi nasution and atika azmi utammi nasution on district head election in mandailing natal regency in 2020. This research using methods qualitative approachment . data count technique is using interview , observate, and also documentation . and all of these data analyzed with qualitative way . the result of this research partner candidates of ja'far and atika do a strategy like approachment with public figure , young man, and colleger. Optimalyzed teamworking of winning teamwork and polytic party team as "polytic machine". Making a campaign that suit with the culture or public local culture and also making approachment with young man and millennials . the struggle that candidates faced is like n the same surname (Nasution), minimum commitmen from supporter political party

To operate political party machine . one of candidates was vice of regent in previous period and makes public feel hard to find changes, and the regent's viced claimed not having experience in polic and government aspect, also still in young enough age to lead as big mandailing natal .

Key words : Strategy , Campaign, Politic

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Strategi Pemenangan Pilkada Jakfar Sukhairi Dan Atika Azmi Utammi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022*". Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa saran, bimbingan maupun petunjuk serta bantuan dalam bentuk lain. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Junit dan Ibu Asminah, serta Keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, perhatian, semangat dan motivasi yang tiada batasnya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk do'a, kasih sayang, dan dukungannya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibuk Evi Yunita Kurniati. S Sos, S.IP selaku ketua program studi ilmu pemerintahan sekaligus yang menjadi dosen pembimbing kedua yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membimbing dan banyak berbagi ilmu kepada penulis.

5. Bapak Yurial Arief Lubis,S.Sos, M.IP. selaku dosen pembimbing pertama yang juga telah bersedia membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibuk Fitri Suciaty selaku Dosen yang menjadi penguji pada ujian sidang skripsi yang baik.
7. Seluruh dosen, khususnya program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
8. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 dan teman-teman Universitas Medan Area angkatan 2018 yang telah memberikan banyak masukan, dukungan, dan do'a kepada penulis.
9. Teman-teman dan juga pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan yang telah membantu dalam kegiatan selama ini sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari dan meyakini bahwa karya sederhana ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan karya selanjutnya. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
2. Secara Praktis.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Tentang Strategi.....	10
2.1.1 Pengertian Strategi.....	10
2.2 Pengertian Demokrasi.....	11
2.3 Pengertian Kampanye	12
2.3.1 Jenis-Jenis Kampanye	14
2.4 Pengertian partai politik.....	15
2.4.1 Tujuan partai politik.....	19
2.4.2 Fungsi partai politik (pasal 12) diantaranya:.....	19
2.4.3. Hak Partai Politik (pasal 12) diantaranya:	20
2.4.4 Kewajiban Partai Politik (pasal 13)	21
2.6. Pengertian pemilihan kepala daerah (PILKADA)	24
2.6 Penelitian Terdahulu	26
2.7 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 JENIS PENELITIAN LOKASI DAN TEMPAT.....	30
3.1.1 Jenis Penelitian.....	30
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	31

3.1.3 Waktu Penelitian	32
3.2 Informan Penelitian.....	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1. Profil Mandailing Natal	38
4.1.2. Hasil Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020	39
4.1.3. Latar Belakang Kontestan	42
4.1.4. Visi Misi dan Program Calon Kontestan	43
4.2. Hasil dan Pembahasan	45
4.2.1. Strategi Tim Pemenangan Pilkada Mandailing Natal Pada Tahun 2020	46
4.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Tim Pemenangan	57
4.4. Pemungutan Suara Ulang (PSU).....	60
BAB V	63
PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan dan Saran	63
5.1.1. Kesimpulan	63
5.1.2. Saran	64
Daftar Pustaka	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Calon Bupati Mandailing Natal.....	5
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	34



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat. Keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bentuk partisipasi politik paling minimal sebagai warga negara.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan hak suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *directaction* nya. Salah satu wujud partisipasi warga negara salah satunya melalui pemilihan umum kepala daerah.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) menunjukkan adanya kualitas demokrasi di indonesia pada era reformasi ini Pemilihan kepala daerah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon-calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) yang dikehendakinya secara langsung tanpa diwakilioleh DPRD. Sistem pemilihan secara langsung dengan mengumpulkan suara terbanyak seperti ini yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam demokrasi politik. karena

partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah selama tiga tahun kedepan.

Sistem pemilihan kepala daerah yang awalnya dipilih melalui anggota DPRD kemudian berbuah dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah). Sistem pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 24 ayat 5 tentang kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang merupakan bukti nyata reformasi kebijakan sistem politik Indonesia.

Beberapa tahapan dalam pemilukada meliputi pencalonan kandidat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kemudian seleksi berkas, pengundian nomor kandidat yang lolos seleksi, penentuan jadwal kampanye, oleh masing-masing kandidat, kemudian pelaksanaan pemilihan serta yang terakhir adalah pengumuman resmi oleh KPU terhadap kandidat nya dinyatakan menang terhadap sebuah pemilihan

Pilkada langsung di Indonesia sendiri pertama kali dilaksanakan tahun 2005 di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pada tahun-tahun berikutnya diadakan pilkada serentak salah satunya di Kabupaten Mandailing Natal. Pilkada serentak tahun 2020. di Kabupaten Mandailing Natal di ikuti oleh 3 pasangan di antaranya Sebanyak tiga pasang bakal calon Bupati/Wakil Bupati Mandailing Natal telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina mulai tanggal 4 September sampai tanggal 6 September 2020. Ketiga pasangan calon Kepala Daerah ini bakalan bersaing untuk merebut hati masyarakat Madina dengan sejuta strategi yang mereka yakini akan berhasil.

Strategi sebagai rencana yang di satukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi, dengan tantangan di lingkungan, yang di

rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat yang di lakukan oleh parpol

Partai politik juga mempunyai kewenangan yang besar dan strategis untuk mengajukan pasangan calon untuk momentum pilkada sesuai dengan pasal 9 UU No. 10 tahun 2016 tentang pilkada menjelaskan bahwa peserta pilkada adalah pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. pilkada dengan sistem pemilihan secara langsung menyebabkan persaingan ketat di antara kandidt di suatu daerah, untuk meraih suara terbanyak, para calon saling bersaing satu sama lain untuk mencari suara terbanyak. Para calon saling bersaing satu sama lain persaingan ini mengakibatkan para calon saling beradu strategi, taktik dan metode kemenangan.

Strategi dan taktik ini juga di dukung dengan biaya politik yang besar, strategi politik adalah strategi yang di gunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. tanpa menggunakan strategi, kekuasaan merupakan tujuan utama berpolitik tidak akan pernah terwujud. Selain itu untuk memenangkan pertarungan perluadanya konsolidasi sesama partai sebagai tahapandari strategi pertama, konsolidasi partai politik menjadi modal utama calon dalam meraup suara di wilayahnya, konsolidari yang erat dan solid dari para parpol pendukung ini merupakan kunci kemenangan paslon terutama pada saat pelaksanaan kampanye, konsolidasi menjadi hal yang sangat penting Menurut Lock dan Harris, kampanye politik terkait erat dangan pembentukan *image* politik .

Dalam demikian konsolidasi pada masa kampanye perlu di lakukan secara menyeluruh dari perencanaan, pelaksanaan sehingga tahap evaluasi, tahap perencanaan bagian yang paling pentting agar kemenangan paslon dapat tercapai

yang di harapkan, dalam tahapan ini tim pemenangan perlu membuat target bersama dan memilih salah satu untuk mencapai sasaran. Target ini dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang di buat, dengan demikian dalam tahapan ini partai pengusung harus betul-betul mempersiapkan cara supaya calon yang di dukung bisa mendapatkan kemenangan yang di harapkan.

Dalam tahapan tim pemenangan perlu melakukan kerjasama sebagai tim dalam membuat ide yang mengenal pada masyarakat, dalam tim pemenangan perlu juga membuat atribut yang membedakan kndidat denngan kandidat lain, tim pemenangan juga harus mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat melaluai isu-isu politik yang berkembang dan informasi seputar kandidat, yang dimana keluarga si kandidat orang berpengaruh atau memiliki nama baik di dalam masyarakat yang yang di tempati si kandidat di daerah tersebut hal ini untuk mendorong si pemilih untuk meyakinkan dirinya supaya membuat pilihan yang menguntungkan dirinya.

Berikut pasangan calon dan wakil calon kepala daerah kabupaten Mandailing Natal yang akan bersaing dalam memperebutkan kursi eksekutif, berikut daftar nama calon dan wakil calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

No	Nama Calon Bupati dan wakil Bupati	Partai
1.	HM Ja'far Sukhairi Nasution – Atika Azmi Utami	PKB, PKS, HANURA
2.	Drs. Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin Parinduri	Golkar, PPP, Pdip, Partai Perindo, Partai

		Nasdem, PKPI, Partai Berkarya
3.	Sofwat Nasution – Zubeir Lubis	PAN, GERINDRA, DEMOKRAT

Tabel 1.1 Calon Bupati Mandailing Natal

Pemasaran politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan oleh sebuah partai politik, politikus, atau kontestan dalam membangun kepercayaan dan citra publik. Publik akan mencatat dan menyimpan dalam memorinya semua kegiatan politik, wacana politik, dan kepedulian kepada masyarakat yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh partai politik atau politikus secara individual. Hal itu akan diingat terus oleh publik pada saat akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Butler dan Collins, 2001 hal. 75)

Dalam melakukan pemasaran politik, yang harus dilakukan tim sukses atau tim pememangan dengan menggunakan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan kampanye di daerah tersebut supaya masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan calon tersebut dan bisa menyakini masyarakat, tim sukses juga perlu melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokos masyarakat yang berpengaruh di daerah tersebut, supaya tokoh tersebut bisa memberi keyakinan kepada si pemilih agar salah satu calon tersebut bisa memperoleh suara, tim pemenang juga harus melakukan pendekatan kepada pemuda-pemuda daerah tersebut karna sangat berpengaruh di daerah tersebut , tim pemenang juga perlu mengeluarkan biaya kepada pemuda daerah dan menanyakan apa saja keperluan pemuda di daerah, supaya pemuda itu bisa meyakini calon itu dan bisa memberikan suara.

Mengingat akan pentingnya strategi dalam memenangkan calon kandidatnya, dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul : **STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN CALON H. MUHAMMAD JA'FAR SUKHAIRI NASUTION DAN ATIKA AZMI UTAMMI NASUTION DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka rumusan masalah yang di angkat adalah:

1. Bagaimana strategi yang di lakukan pasangan HM Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi, dalam memenangkan PILKADA di Mandailing Natal, Sumatera Utara Tahun 2020.
2. Apa saja hambatan tim kampanye HM Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi, dalam memenangkan PILKADA di Mandailing Natal . Sumatera Utara Tahun 2020

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimna strategi yang di lakukan pasangan H.Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution, untuk memenangkan PILKADA di Mandailing Natal Sumatera Utara Tahun 2020
2. Mengetahui kampanye yang diterapkan H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution – Atika Azmi Utami Nasution dalam memenangkan pilkada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Menurut Ahmad (2015: 188) Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jika tujuan penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka saat ini yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Khususnya di bidang Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
- b. Dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan strategi pemenangan dalam pilkada di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

2. Secara Praktis

a. Bagi jurusan

Sebagai kajian ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik yang berkaitan dengan pilkada dan strategi pemenangan yang ada kaitannya dengan kampanye politik, komunikasi politik, dan marketing politik. diharapkan dan berguna untuk jurusan Ilmu pemerintahan

b) Bagi pasangan kandidat

penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi kepada kandidat yang akan maju dalam pemilihan bupati. Bisa juga digunakan sebagai referensi bagi siapapun yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah, terutama yang terkait dengan strategi pemenangan.

c) Bagi peneliti

peneliti dapat di harapkan dapat lebih sadar akan ada krisis menjadi warga negara termasuk pengetahuan ilmu politik



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan arah serta ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, Agar memenuhi keperluan pasar serta melengkap harapan pemangku kepentingan. Strategi itu merupakan suatu proses manajemen yang sistematis yang didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi & perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang (Anthony dan Govindarajan dalam Manullang, 2014: 17)

Strategi itu sendiri memiliki tujuan yaitu “kemenangan”.Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam perolehan tambahan suara. Dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidatnya atau dalam mayoritas bagi suatu peraturan. Bagaimana kemenangan tersebut digunakan merupakan tujuan politik yang ada di balik kemenangan yang nampak Peter Schroder (2004:4).(Suami Rahmah, 2019:8)

Kampanye merupakan salah satu cara yang digunakan oleh calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat sebagai pemilih. Kampanye politik selama ini hanya dilihat sebagai suatu proses interaksi intensif dari kandidat kepada publik dalam kurun waktu tertentu menjelang suatu pemilihan. Dalam definisi ini, kampanye politik hanya diartikan sebagai suatu

periode yang diberikan oleh panitia kepada semua kandidat atau kontestan untuk memaparkan semua program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka waktu pencoblosan (Firmanzah, 2008: 271).

. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan agar ikatan diantara pendukung tidak lemah dan untuk menghindari pengaruh asing yang bisa menarik perhatian mereka. Juga menyiapkan perencanaan yang matang sebagai konstantan. Mulai dari awal hingga akhir, termasuk penyediaan badan hukum untuk antisipasi kecurangan ataupun sengketa pemilihan

2.2 Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu tinjauan bahasa (etimologi) dan tinjauan istilah (terminologi). Secara etimologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos- cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Defenisi dari demokrasi memiliki banyak varian yang berada dari satu pakar dengan pakar lainnya bahkan dapat dikatakan konsep demokrasi merupakan konsep yang amat fleksibel sehingga tampak dapat ditarik-tarik sebagaimana seorang individu menginterpretasikan demokrasi tersebut sesuai apa yang di yakinkannya.

Menjelaskan bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis sejauh para pengambil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih, dalam hal ini demokrasi mencakup dua dimensi yaitu persaingan dan partisipasi.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:108), istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam kata lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (direct democracy) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (representative democracy) adalah suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.

Esensi demokrasi adalah proses penyelesaian sesuatu yang ideal, karena itu tidak pernah tercapai secara penuh. Demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas.

2.3 Pengertian Kampanye

Kampanye merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan berupaya mempengaruhi khalayak sebagai target sasaran. Pendapat lain di kemukakan oleh Roger dan Storey, kampanye diartikan sebagai, serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu, merujuk pada definisi di atas maka pada sebuah kampanye pastilah mengandung empat hal yakni :

- a. tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
- b. jumlah khalayak sasaran yang besar,
- c. biasanya di pusatkan dalam kurun waktu tertentu,
- d. melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Dalam pelaksanaan kompetisi untuk meraih jabatan publik seperti pemilihan umum (pemilu), kampanye politik tidak selalu berjalan dengan datar tanpa dinamika di dalamnya, baik bagi kandidat maupun bagi kompetitor di dalamnya. Karena ini adalah merupakan kompetisi dalam meraih jabatan publik yang di dalamnya terdapat kekuasaan politik maka sebuah kemenangan adalah hal yang amat di inginkan bagi setiap kandidat yang berkompetisi segala usaha dan tindakan yang telah di rancang ataupun berbentuk secara spontanitas selalu memiliki efek tertentu dalam kepentingan tercapainya misi meraih kemenangan.

Dari kesimpulan diatas, bahwa kampanye politik merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan sebuah suara, melakukan

kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok organisasi.

2.3.1 Jenis-Jenis Kampanye

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu:

- a. Debat publik / debat terbuka antar calon,
- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- a. Pemasangan alat peraga di tempat umum,
- b. Penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik,
- d. Penyiaran melalui radio dan atau televisi,
- e. Pertemuan Terbatas,
- f. Rapat umum, dan
- g. Tatap muka dan dialog.

Masih tentang pengertian kampanye, UU pasal 1 ayat 26 No. 10 tahun 2008 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi dan Misi serta program yang ditawarkan. Kesuksesan setiap kampanye selalu hadir para perancang pesan yang sensitif dan kreatif (Roger dan Synder, 2002:10).

Para perancang tersebut mempunyai kepekaan untuk mengidentifikasi khalayaknya dan memiliki kreativitas dan mendesain pesan sesuai ciri-ciri umum khalayak yang menjadi sasaran utama. Pesan atau isu sangat penting dalam meningkatkan “nilai jual” kandidat. Kandidat atau calon akan berupaya untuk

memaksimalkan dan meyakinkan masyarakat dengan pesan yang ia sampaikan. Singkatnya, pesan-pesan itu disampaikan semenarik mungkin agar calon pemilih dapat tertarik untuk memilihnya. Sudah menjadi hal yg umum, setiap kandidat dalam kampanye selalu menggembar-gemborkan isu-isu/ topik-topik tertentu. Jika dipahami, ini adalah bagian atau contoh dari bentuk pesan kampanye. Pesan/isu tersebut biasanya berupa topik tertentu atau fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Barangkali kita sering mendengar kalimat 'kampanye adalah jualan isu'. Istilah seperti itu mungkin ada benarnya. Beberapa contoh diantaranya adalah isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dalam tema tersebut, maka pesan kampanyenya adalah tentang peningkatan kesejahteraan. Baik dalam bentuk rencana program-program ekonomi ataupun program relevan lainnya.

1. Kampanye Massa. Meliputi kampanye tatap muka, misalkan melalui media cetak dan elektronik termasuk orasi dan mengerahkan massa,
2. Kampanye Antar Pribadi. Menggunakan tokoh-toko yang dekat dengan kandidat dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh lokal dengan setting informal.
3. Kampanye Organisasi. Dilakukan oleh organisasi yang mendukung kandidat.

2.4 Pengertian partai politik

Secara umum dapat di gambarkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi dimana tempat berkumpulnya orang-orang yang secara sukarela mempunyai aspirasi dan pandangan yang sama untuk berjuang bersama dalam rangka memperjuangkan atau menyalurkan aspirasi anggotanya lewat

organ/institusi tertentu sebagaimana yang di atur oleh sebuah negara dalam peraturan perundang undangan.

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik yang demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.

Kalaupun sekarang partai politik ternyata harus hadir dalam kehidupan masyarakat republik, ketika kelompok bangsawan dianggap tidak ada lagi, bukan berarti bahwa manfaat partai politik menjadi tidak penting. Partai politik yang kita kenal sekarang adalah lembaga pengendalian konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat politik nasional. Partai politik adalah lembaga yang harus mengagregasi, mengartikulasi kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mensosialisasikan nilai-nilai politik yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari partai politik yaitu :

- a. Sosialisasi politik; adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
2. Partisipasi politik; adalah fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik.
3. Komunikasi politik; adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
4. Artikulasi Kepentingan; adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi)kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan

politik dan pemerintah melalui melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama

5. Agregasi kepentingan; adalah fungsi partai politik yang memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
6. Pembuatan kebijakan; adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan didalam pemerintahan secara konstitusional. (Ellya Rosana, 2012; 144-145)
Menurut Miriam Budiardjo dalam Labolo Muhadam (2015:11). Dalam partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

2.3.2. Syarat Pembentukan, Tujuan, Fungsi, dan Kewajiban Partai Politik

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 pasal 2 dinyatakan bahwa syarat pembentukan Partai Politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap Provinsi.

- a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili oleh seluruh partai pendiri Partai Politik dengan akta notaris .
 - b) Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- 2) 2.pendiri dan pembentuk Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 30% keterwakilan perempuan
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta pengurusan Partai Politik tingkat Pusat.
- 4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paaling sedikit :
- a. Asas dan ciri Partai Politik
 - b. Visi dan misi Partai Politik
 - c. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik
 - d. Tujuan dan fungsi Partai Politik
 - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan
 - f. Kepengurusan Partai Politik
 - g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan Politik
 - h. Sistem kaderisasi
 - i. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik
 - j. Peraturan dan kepengurusan Partai Politik
 - k. Pendidikan politik,dan
 - l. Keuangan Partai Politik
 - m. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

5. Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan

Partai Politik didirikan bukan tanpa tujuan, adapun tujuan Partai Politik itu didirikan adalah sebagai berikut:

2.4.1 Tujuan partai politik

1. Tujuan umum partai politik adalah :

Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.
3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan khusus partai politik

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan partai politik dalam pemerintah.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.4.2 Fungsi partai politik (pasal 12) diantaranya:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari beberapa poin yang telah penulis paparkan di atas tentang fungsi partai politik, sedikit berbeda menurut Miriam Budiarjo dalam Labolo Muhadam. (2015:16)

1. Sarana komunikasi politik
2. Sarana sosial politik
3. sebagai saran rekrutmen politik
4. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Managemen*)

2.4.3. Hak Partai Politik (pasal 12) diantaranya:

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- b. Memproleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakililan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan pemberhentian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan wakil Gubernur, calon bupati dan wakil Bupati, serta calon Walikota dan wakil Walikota, , sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Membentuk dan memiliki Organisasi sayap Partai Politik
- i. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.4 Kewajiban Partai Politik (pasal 13)

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.

- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik
- f. mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum
- g. melakukan pendaftaran memelihara ketertiban dan anggota.
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka kepada masyarakat.
- i. membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara berkala 1 sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- j. Mensosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

2.5. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan salah satu bentuk instrumen pelembagaan periodik dalam menerjemahkan demokrasi, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Menghadapi kompetisi pemilu para politisi menghimpun diri dalam partai sebagai wadah mengorganisir nilai dan kepentingan yang hendak diperjuangkan, melalui eksplorasi nilai dan kepentingan, para politisi dan partai berusaha membangun pengaruh sekaligus membentuk kesolidaritasan guna mobilisasi dukungan rakyat dalam memenangkan pemilu.

Pemilu menjadi medium mengonversi kekuatan politik masyarakat sipil (partai politik) ke dalam suprastruktur pemerintahan negara. Sebagaimana medium mengonversi kekuatan politik masyarakat sipil. Pemilu sekaligus berpungsi mentranspormasi format keterwakilan rakyat dalam pemerintah. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang sistem pemilu dan berbagai perangkat ketentuan pemilu

lainnya, tidak jarang menjadi perdebatan dalam usaha menerjemahkan demokrasi perwakilan.

Dalam bukunya Firdaus (2015:401) yang berjudul Pemerintahan Demokrasi dan sistem kepartaian ada dua arus perdebatan konsep perwakilan yang senantiasa menjadi landasan dalam penentuan sistem pemilu, dan secara tidak langsung berimplikasi terhadap pelebagaan sistem kepartaian. Diantara konsep tersebut adalah yang pertama konsep perwakilan proporsional (*Proportional representation*) dan yang kedua konsep perwakilan distrik (*district representation*).

2.5.1. Konsep sistem pemilu proporsional

Dimana distribusi kursi diantara partai politik peserta pemilu dibagi berdasarkan proporsi perolehan suara secara nasional menurut jumlah bilangan pembagi tertentu. Proporsi perolehan suara partai secara nasional, sebagai dasar pembagian kursi dalam lembaga perwakilan rakyat, memperkecil terbuangnya sisa suara serta memperbesar peluang keterwakilan rakyat, hingga pada partai-partai politik terkecil. Tidak salah jika kalkulasi peluang yang diciptakan oleh sistem pemilu proporsional menjadi pemicu perpecahan partai atau terbentuknya partai-partai baru. Oleh sebab itu, sistem pemilu proporsional cenderung memperbesar jumlah partai efektif yang berdampak pada terbentuknya sistem multipartai.

2.5.2 Konsep sistem pemilu distrik

Salah satu sistem pemilu yang dalam banyak segi cenderung mengendalikan jumlah partai efektif. Hal tersebut terjadi karena suatu negara dibagi dalam beberapa distrik yang mana pembagian kursi, didasarkan pada satu distrik, dimana satu orang wakil dengan mekanisme suara terbanyak (*plurality system*) atau *the first past the post*. Artinya, pemenangan suara terbanyak pertama mewakili

distriknya. Sedangkan calon pemenang kedua dan seterusnya terbuang begitu saja tanpa dapat diperhitungkan dan dijadikan bilangan pembagi dalam perolehan kursi. Akibatnya, sistem pemilu distrik dapat menimbulkan disproportionalitas yang tinggi. Tetapi pada sisi lainnya memaksa partai-partai melakukan fusi untuk memenangkan satu distrik pemilihan. Oleh sebab itu terpilihnya satuwakil membentuk emosional yang kuat dengan konstituen daerah pemilihan

2.6. Pengertian pemilihan kepala daerah (PILKADA)

Menurut Parulian Donald, Pemilu memang bukan segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara. Setiap daerah di Indonesia tidak beda dari kata pemimpin di antaranya adalah Gubernur, Bupati dan walikota, pemilihan kepala daerah diselenggarakan langsung dengan pemilihan umum.

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dengan wakil kepala daerah yang di maksud mencakup:

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Wali kota dan wakil walikota untuk kota

Dari sisi normatif, penyelenggaraan pilkada telah diatur melalui UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti UU nomor 22 tahun 1999. Seiring dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan PP nomor 17 Tahun

2005 sebagai pengganti PP nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, kepala daerah seperti gubernur (propinsi) dan bupati/walikota (Kabupaten/Kota) akan dipilih oleh rakyat.

Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan demikian gubernur, bupati dan walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2005 dan setelahnya akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perubahan sistematika pemilihan kepala daerah telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon-calon kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang dikehendaknya secara langsung tanpa diwakili oleh DPRD. Sistem pemilihan secara langsung dengan mengumpulkan suara terbanyak seperti ini memerlukan upaya persuasif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam demokrasi politik, karena partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setidaknya lima tahun ke depan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah mengatur juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh KPUD (Grafika, 2008:150). Tugas berat terletak kepada pundak KPUD, Sebagai penyelenggara pilkada. Merekalah yang akan “memandegani” proses pemilihan

kepala daerah, yang pada pemilu legislatif dan presiden tahun lalu dilakukan oleh KPU.

Di sinilah urgensinya untuk melakukan kajian, pemetaan dan evaluasi berbagai pilkada yang telah dilakukan diberbagai daerah daerah, sebagai bahan merumuskan desain perencanaan pilkada di masa mendatang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu tentang judul ini di antaranya adalah :

Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian	Metode penelitian
<i>“Strategi Pemenangan Irwandi Yusuf Pada pilkada Pilkada Tahun 2017 Dib Aceh Besar.</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemenangan Irwandi Yusuf pada Pilkada tahun 2017 di Aceh Besar serta faktor-faktor yang Menyebabkan Irwandi-Nova meraih kemenangan di Aceh Besar. Hal tersebut yang menjadi fokus peneliti tentang bagaimana strategi pemenangan Irwandi Yusuf pada Pilkada Tahun 2017 di Aceh Besar.	Penelitian yang di gunakan dan teori yang di gunakan	Kualitatif dan deskriptif
<i>Strategi Pemenangan Pasangan Calon Walikota Pada</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi pemenangan pasangan calon H. Mohan Roliskana, S.Sos. M.H dan TGH.	Penelitian yang di lakukan dan	Kualitatif dan deskriptif

<p><i>Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Pasangan Calon H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H Dan Tgh. Mujiburrahman).</i></p>	<p>Mujiburrahman khususnya dalam hal strategi marketing politik dan juga kampanye politik yang dilakukan pada Pilkada di Kota Mataram tahun 2020.</p>	<p>teori yang di gunakan</p>	
<p><i>Strategi Pemenangan Andi Irwan Hamid dan Alimin dalam Pilkada Kabupaten Pinrang Tahun 2018.</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemenangan Andi Irwan Hamid dan Alimin pada pilkada Kabupaten Pinrang Tahun 2018 yaitu intens melakukan kampanye door to door, membangun basis massa atau daerah perang politik, memaksimalkan peran keluarga besar, komunikasi politik dalam mencari dukungan, memasifkan penggunaan sosial media online dan pemasangan atribut kampanye offline (flyer, banner, baliho) yang tepat sasaran.</p>	<p>Penelitian dan teori yang di gunakan</p>	<p>Kualitatif dan studi kasus</p>
<p><i>Strategi pemenangan pilkada langsung di</i></p>	<p>pemenangan koalisi pasangan Edi Rumpoko – Punjul Santoso adalah</p>	<p>Penelitian dan teori</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>

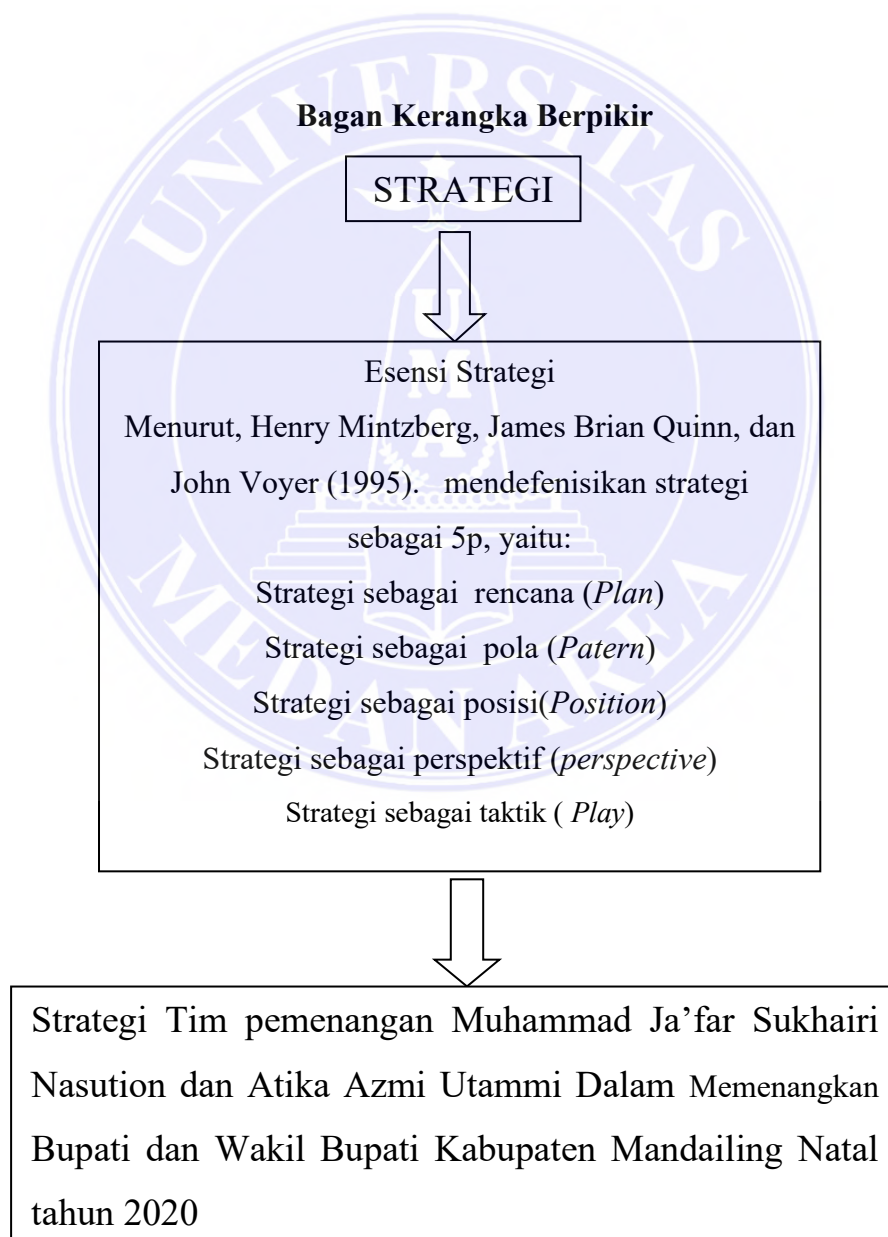
<p><i>kota batu periode 2012 – 2017,</i></p>	<p>dengan memberikan konsolidasi wawasan dan konsolidasi organisasi secara keseluruhan. Suksesnya konsolidasi ini merupakan upaya yang sangat penting dan mendasar karena keberhasilan dan kesuksesannya konsolidasi merupakan modal utama guna menuju suksesnya pilkada.</p>	<p>yang di gunakan</p>	
<p><i>Strategi pemenangan pasangan H. Fadeli dn Amar Syaifudin dalam pilkada lamongan 2010.</i></p>	<p>Partai politik sebagai kontestan pemilihan kepala daerah dalam pemilihan daerah tentunya mulai melakukan pengembangan strategi dalam mendekati masyarakat dan kelompok masyarakat yang berpengaruh untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.</p>	<p>Penelitian dan teori penelitian</p>	<p>Kualitatip dan deskriptif</p>

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep untuk melakukan penelitian, dengan adanya kerangka pemikiran maka hasil penelitian yang dilakukan dilapangan tidak bertolak belakang dengan judul penelitian. Dalam

menyusun strategi untuk memenangkan Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution & Atika Azmi Utammi sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten mandailing Natal, Tim pemenangan pasangan calon H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution & Atika Azmi Utammi Nasut, sangat mempunyai pengaruh besar dalam melakukann kampanye.





Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN LOKASI DAN TEMPAT

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif dalam Afifudin (2012: 58), metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) atau dengan kata lain metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan penelitian deskriptif atau melalui uraian-uraian yang

menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkahlangkah dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2005: 63).

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Narkubo dan Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menjikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil peneltian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Peneliitan deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan tempat objek yang akan diteliti, dimana lokasi penelitian merupakan hal terpenting dari suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian

lapangan, untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis memilih kantor tim pemenangan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai lokasi penelitian. Lokasinya berada di Jalan Willem Iskandar Aeg Galoga, Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia

3.1.3 Waktu Penelitian

Dalam proposal Skripsi ini, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada tabel.

No	Kegiatan	Bulan ke :						
		September 2021	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022
1.	Penyusunan proposal							
2.	Seminar proposal							
3.	Perbaikan proposal							
4.	Pengambilan data/penelitian							
5.	Penyusunan skripsi							
6.	Seminar hasil							

7.	Perbaikan skripsi							
8.	Sidang meja hijau							

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti, adapun yang menjadi informan penelitian ini yaitu:

1. Informasi kunci dalam penelitian ini adalah ketua tim pemenangan, H.Muhammad Ja'far sukhairi nasution dan Atika azmi utammi nasution
- 2 Informa utama dalam penelitian ini adalah tim pemenangan di tingkat kecamatan, H. Muhammad jakfar sukhairi nasution dan Atika azmi utammi nasution
- 3 Informan tambahan dalam penelitian ini adalah tim relawan dalam pemenangan, H. Muhammad jakfar sukhairi nasution dan Atika azmi utammi nasution

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017: 137) Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik kondisi alamiah, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer*. Sumber *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data *primer* berdasarkan tekniknya dilakukan melalui, Wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu Sugiyono (2017:139)

b. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan, Susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi saat wawancara.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.

Dengan studi dokumentasi mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mencari dokumen atau data yang berkaitan dengan peneliti, baik data yang didapatkan berupa laporan tertulis ataupun laporan tidak tertulis dan juga berupa foto yang ada di lokasi dan data yang didapat dari media yang ada.

3.4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 42), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh (Miles dan Huberman, 2017: 42).

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari lagi bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran

5.1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan. Berdasarkan penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tim pemenangan pilkada Mandailing Natal melakukan strategi kampanye untuk memenangkan pasangan Jakfar Sukhairi Nasutian dan Atika Azmi Utammi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: melakukan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, serta akademisi untuk memperkuat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan dan tim sukses. melakukan kampanye dalam bentuk tim/kerjasama antara pengurus partai dengan tim sukses, dimana tim yang dibentuk itu adalah mereka orang-orang yang memiliki loyalisnya terhadap partai, utamanya mereka yang termasuk dalam organisasi termasuk pengurus Partai yang mendukung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Melakukan Komunikasi yang baik terhadap masyarakat, contoh komunikasi yang dilakukan tim pemenangan seperti ketika ada

acara dalam partai menyempatkan hadir untuk menampakkan kepada masyarakat bahwa tim pemenangan berbaur dalam masyarakat dan mendafatkan simpati dari masyarakat, serta keramaian-keramaian masyarakat lainnya. Melakukan kampanye sesuai dengan kebudayaan disetiap masyarakat. Dengan tujuan supaya masyarakat lebih tertarik dan tidak bosan akan hadirnya suatu calon di tengah-tengah masyarakat. Melakukan pendekatan terhadap anak-anak muda atau milenial yang ada di daerah tersebut atau masyarakat. Membentuk Tim-tim pemenangan atau Koordinator tiap daerah supaya lebih mudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Hmbatan yang di hadapi dalam tim pemenangan ialah calon kita memiliki marga yang sama dari kedua calon tersebut dan sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai wakil bupati dan dimana masyarakat tidak percaya akan ada perubahan jika si calon kita menempati kursi tersebut, sebagian masyarakat ingin orang yang menempati kursi tersebut orang yang berbeda dari sebelumnya. Wakil bupati kita juga masih belum banyak pengalaman di dunia politik dan masih dalam usia yang relatif muda. Dan hambatan terakhir adalah kurangnya kerjasama dari partai-partai politik pendukung. Hal itu dikarenakan calon bupati yang di dukung merupakan kader dari salah satu partai politik pendukung. Sehingga menyebabkan mesin politik dari setiap partai pendukung tidak berjalan dengan maksimal.

5.1.2. Saran

Berdasarkan wasil wawancara yang penulis dapatkan ketika dilapangan terhususnya di kantor Dpc Partai PKB Mandailing Natal dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupaati yang telah berhasil untuk meyakinkan masyarakat maka penulis miliki beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penulis menyarankan kepada Dpc Partai PKB dan Tim Kemenangan Pilkada Mandailing Natal untuk tetap melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat serta melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat meskipun diluar dari masa kampanye politik, karna masyarakat pada umumnya tidak mengharapkan hadirnya seorang pemimpin daerah ditengah-tengah mereka bukan hanya waktu kampanye saja.
- 2) Penulis menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal yang telah berhasil memenangkan Pilkada pada tahun 2020 untuk selalu mementingkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibandingkan kebutuhan tim, karna pada dasarnya masyarakat telah memberikan hak pilih dan kepercayaannya terhadap beliau selama satu periode pemerintahan daerah.
- 3) Juga diharapkan kepada paslon yang telah memenangkan Pilkada pada tahun 2020 agar menjalankan semaksimal mungkin program-program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat pada masa kampanye, karna masyarakat selalu menunggu akan janji-janji politik pasangan calon yang telah memenangkan pilkada
- 4) Kepada bupati dan wakil bupati dan tim partai lain nya juga harus memperhatikan keluhan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan menanggapi apa saja yang di perlukan masyarakat lainnya

Daftar Pustaka

- Afifuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Butler, Collins. 2001. *Pemsaran Politik*.
- Manullang, M. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- Roger & Synder (2002) *Manajemen Kampanye*. Venus
- Firdaus. 2015. *Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung:Yrama Widya
- Fatturahman Amma, 2010 *strategi pemenangan pasangan H. Fadelli dan Ammar Syaifudin dalam Pilkada Lamongan*
- Handika. R. Benny, 2014, *startegi pemenangan pilkada langsung di kota batu*.
- Hidayat Sulthon Rachman. 2020. *Strategi Pemenangan Pasangan Calon Walikota Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Pasangan Calon H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H Dan Tgh. Mujiburrahman)*
- Labolo Muhadam (2015) *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Rahmah Saumi. 2019. *Strategi Pemenangan Irwandi Yusuf Pada Pilkada Tahun 2017 di Aceh besar*.Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume-1-14
- Yanti Irma. 2018. *Strategi Pemenangan Andi Irwan Hamid Dan Alimin Dalam Pilkada Kabupaten Pinrang Tahun 2018*

Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung

Alfabeta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2016 tentang pilkada

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara dalam Pemilihan Umum











